



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUGENG HARIYANTO

2. Jabatan : **KETUA PRODI D3 BAHASA INGGRIS**

3. NHK : **507908**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.985.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/36 m2 di KAB / KOTA
 MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/127 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
 MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
- 5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/74 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

 MOBIL, HONDA BRIO DD1 1.2 S AT CKD / MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

- MOBIL, ISUZU TBR54F TURBO LS / MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
- 3. MOTOR, HONDA REVO / SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
- MOTOR, HONDA SCOOPY / SEPEDA MOTOR Tahun 2013,
 HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

178.500.000





D. :	SURAT BERHARGA	OK OK	Rp.	OK OH
E. 1	KAS DAN SETARA KAS		Rp.	650.782.237
J.F.	HARTA LAINNYA	al al	Rp.	al all
N. C.	Sub Total	War.	Rp.	3.067.207.237
III. HUTANG			Rp.	
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)			Rp.	3.067.207.237

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id</u>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.